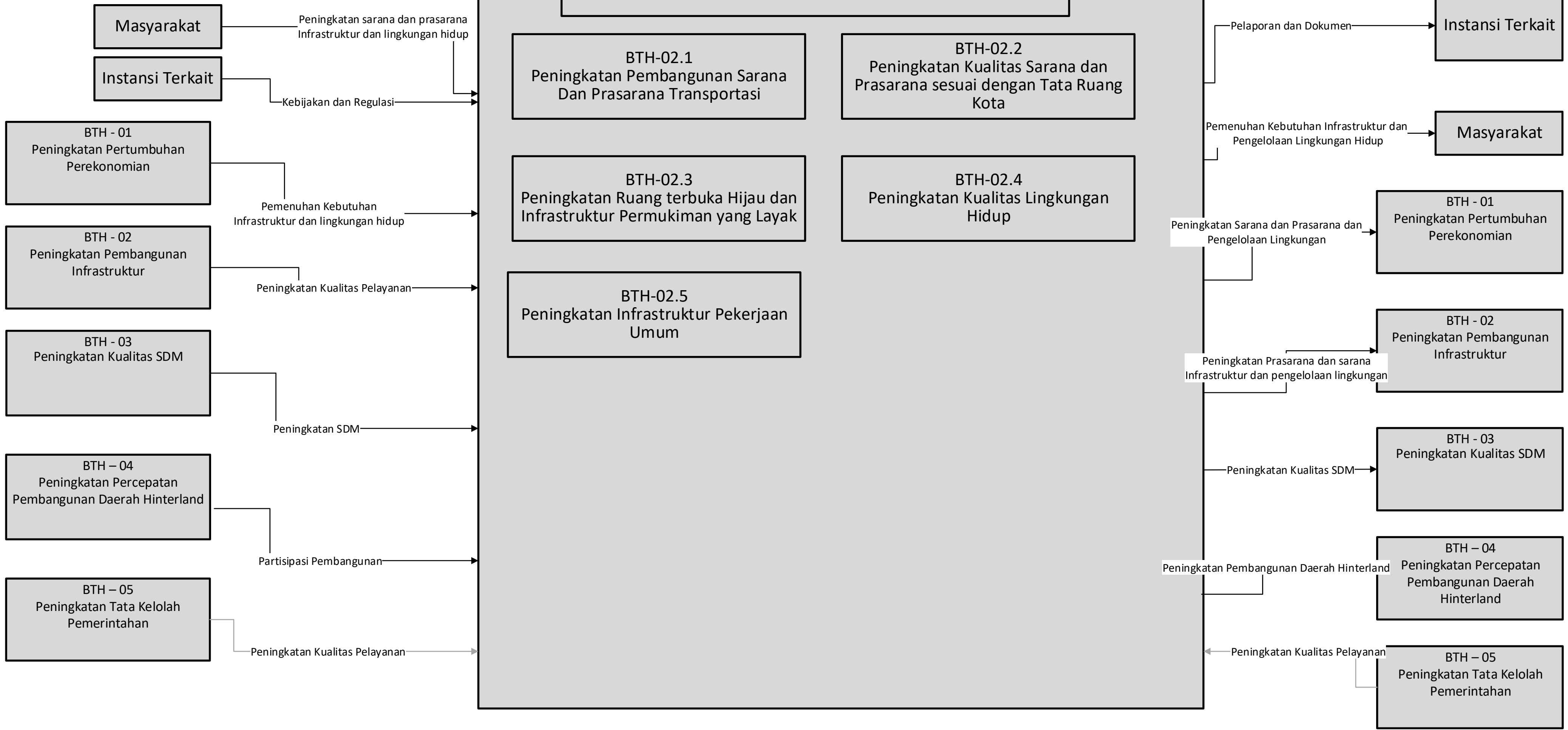


PETA SUB PROSES

BTH - 02
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup



PETA RELASI

BTH - 02.1

PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

DINAS PERHUBUNGAN

BADAN PERENCANAAN &
PENELITIAN PEMBANGUNAN
DAERAH - BAPELITBANGDA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- BPKAD

BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA

INSPEKTORAT DAERAH

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

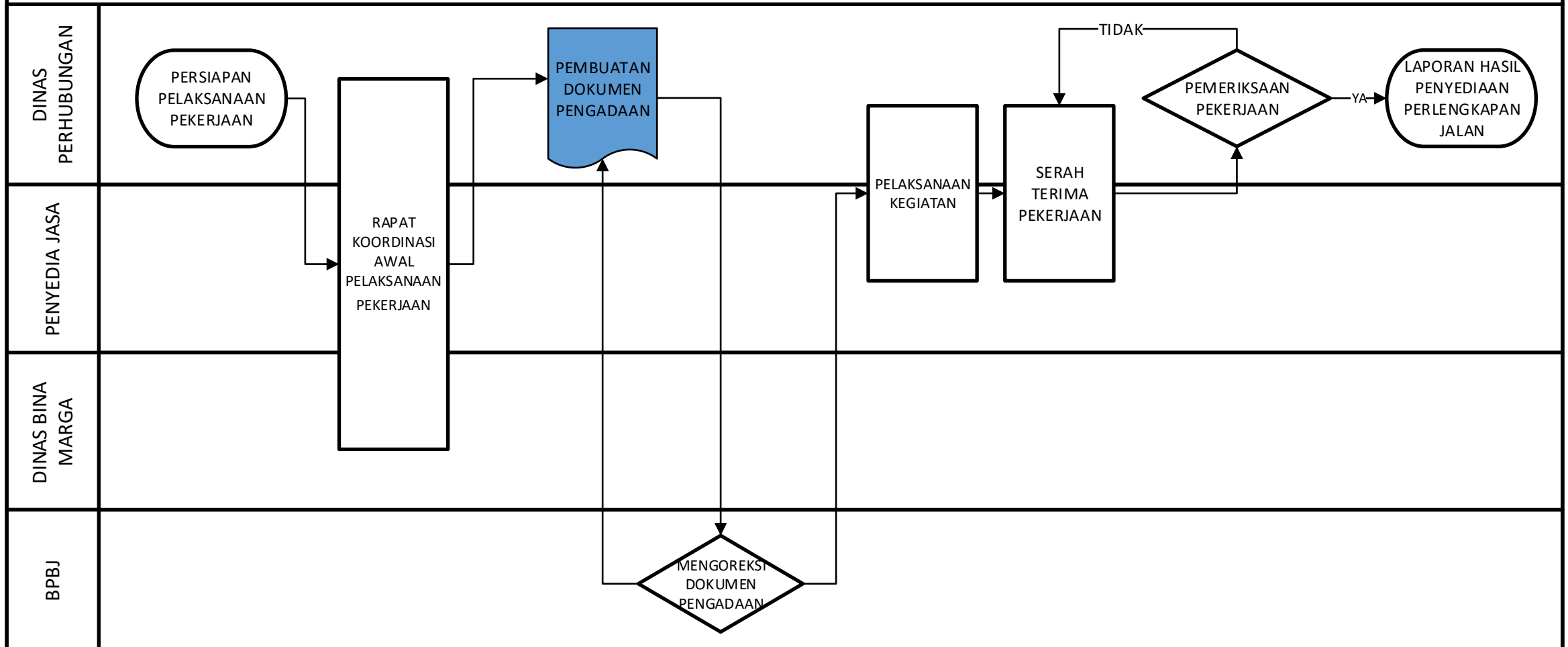
BAGIAN HUKUM

BAGIAN UMUM

SATPOL PP

DINAS BINA MARGA DAN SDA

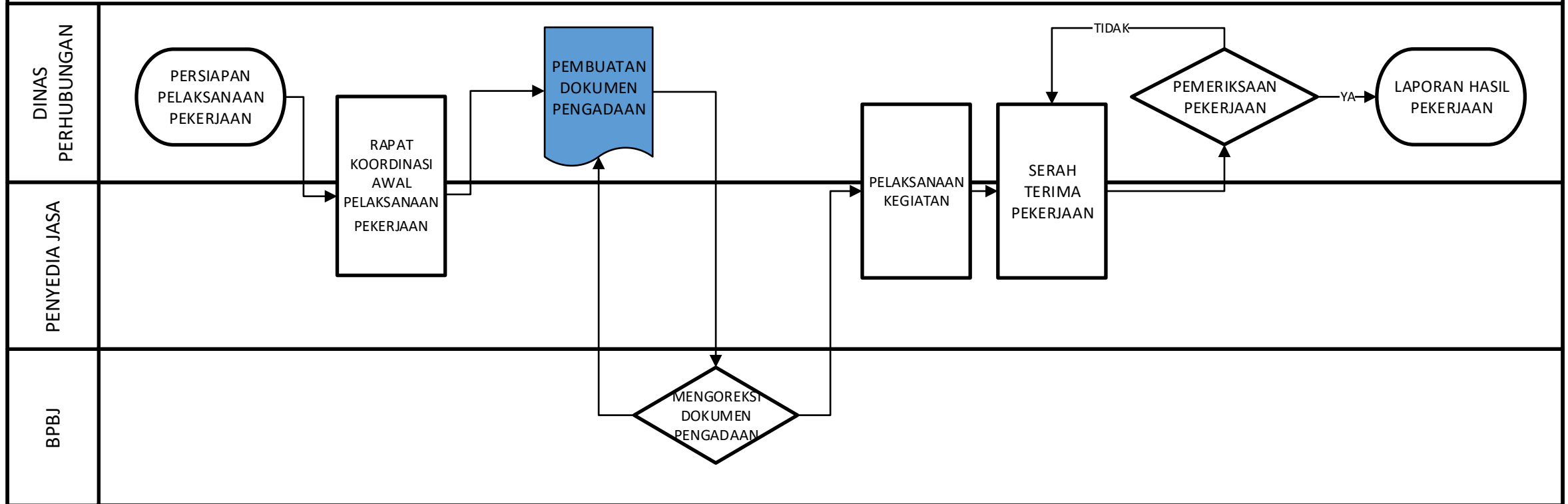
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA



- PENYEDIA JASA :
1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

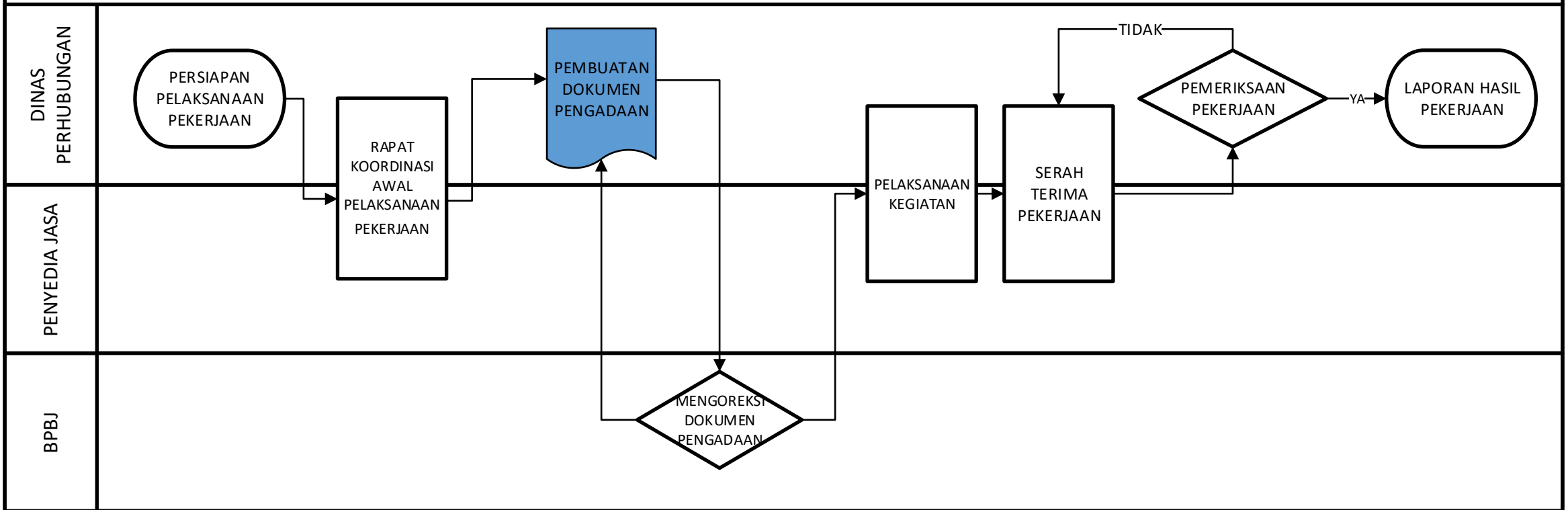
BTH-02.01 CFM 02

PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR



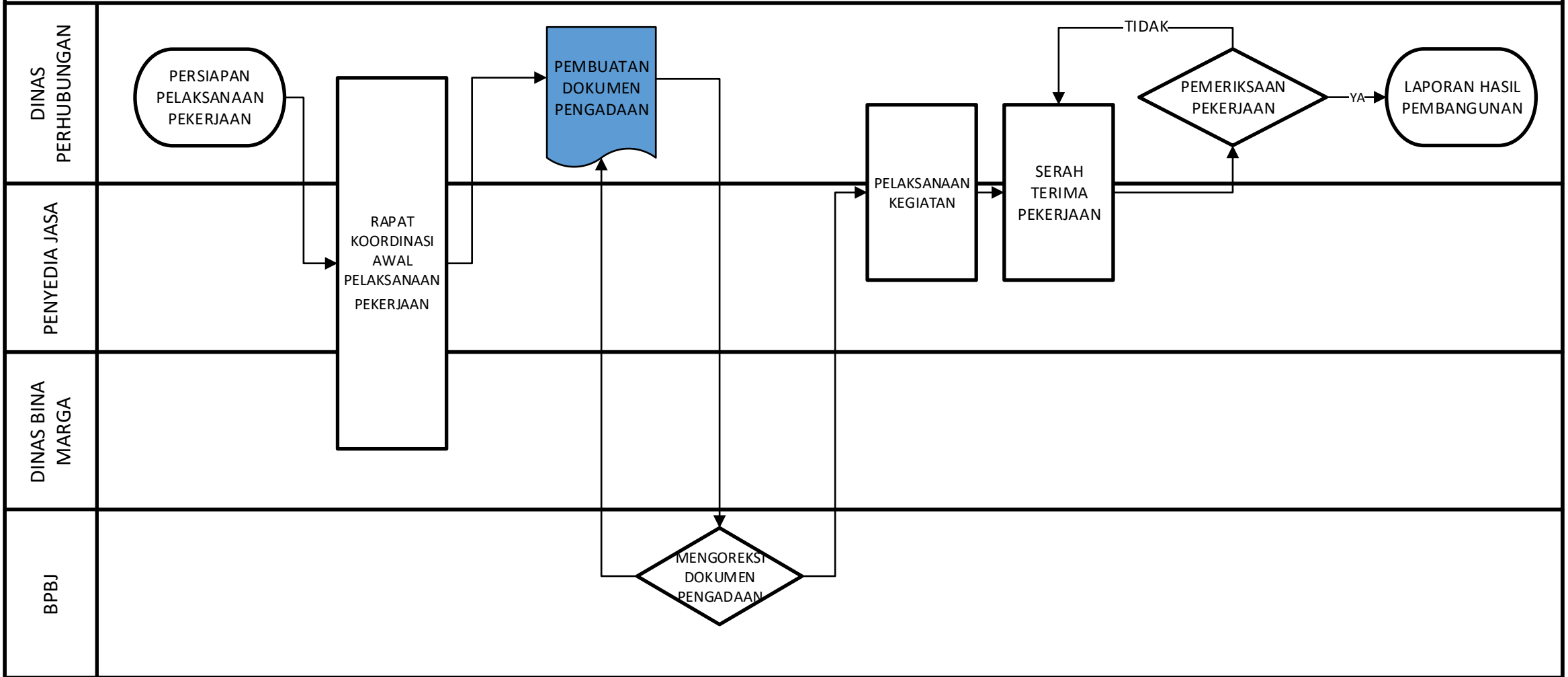
PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

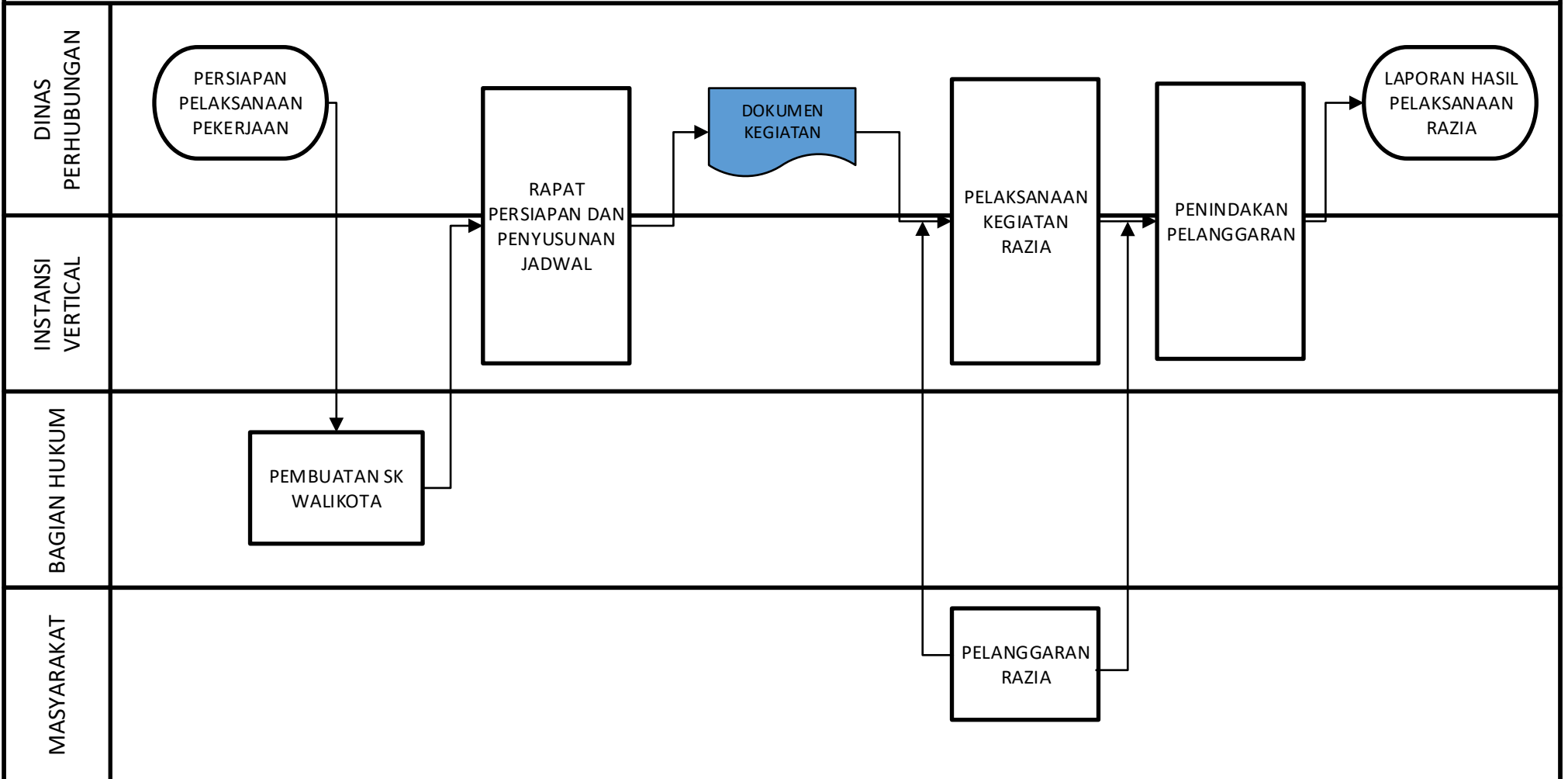
PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

BTH-02.1 CFM 05

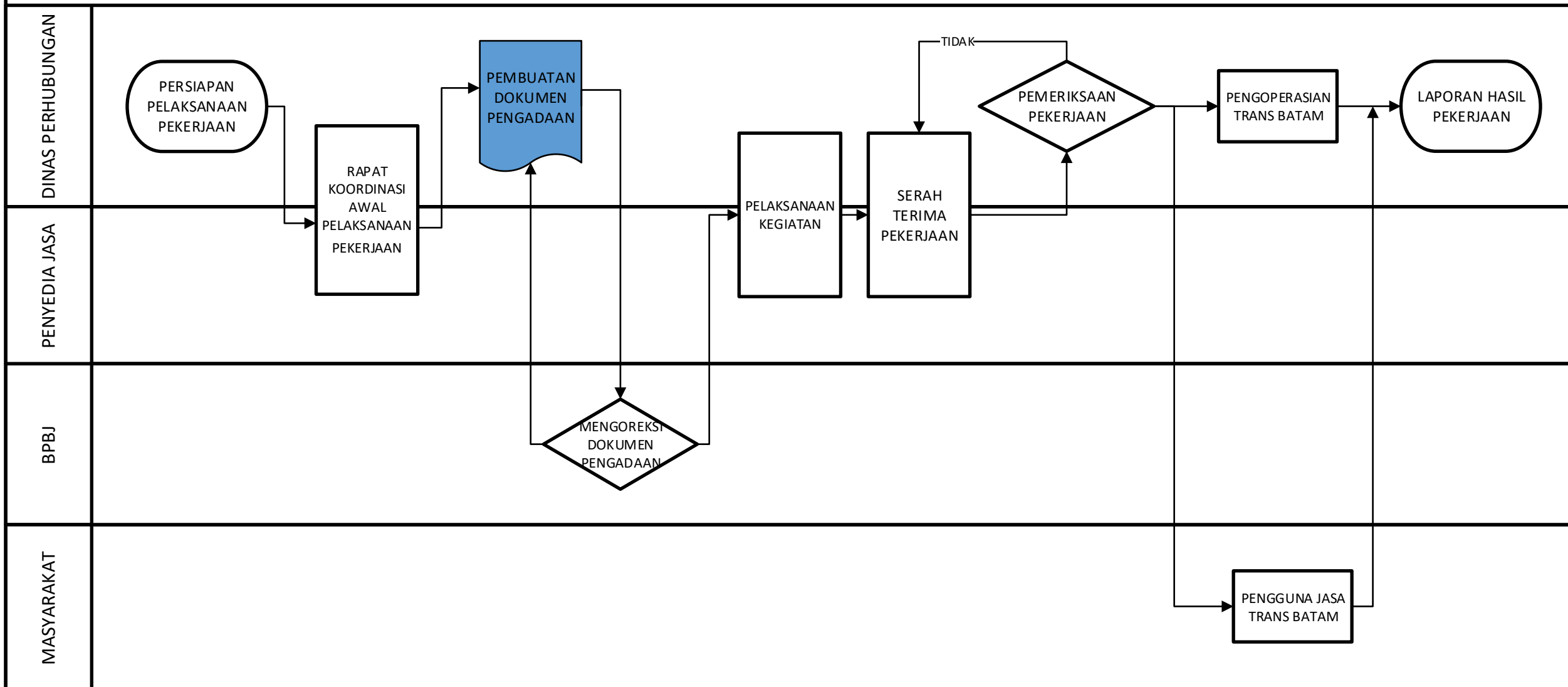
AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN



Instansi Vertical :

1. TNI
2. Polisi
3. Satpol PP

PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PETA SUB PROSES

BTH – 04
Peningkatan Percepatan Pembangunan Daerah Hinterland

BTH-04.1
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dan Transportasi Perhubungan Di Wilayah Hinterland

BTH-04.2
Peningkatan Kualitas Dan Cakupan Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi Di Wilayah Hinterland

BTH-04.2
Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Yang Layak Dan Terjangkau Di Hinterland

Masyarakat

Instansi Terkait

BTH - 02
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

BTH - 03
Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian

BTH – 04
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

BTH – 05
Peningkatan Potensi Pembiayaan Non APBD

Perubahan Prilaku Masyarakat

Kebijakan dan Regulasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Lingkungan

Dukungan Biaya Pembangunan

Pelaporan dan Dokumen

Peningkatan IPM

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dan lingkungan hidup

Peran Serta Masyarakat

Instansi Terkait

Masyarakat

BTH - 02
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

BTH - 03
Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian

BTH – 04
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

BTH – 05
Peningkatan Potensi Pembiayaan Non APBD

PETA RELASI

BTH – 04.1

PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH HINTERLAND

DINAS PERHUBUNGAN

BADAN PERENCANAAN &
PENELITIAN PEMBANGUNAN
DAERAH - BAPELITBANGDA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- BPKAD

BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA

INSPEKTORAT DAERAH

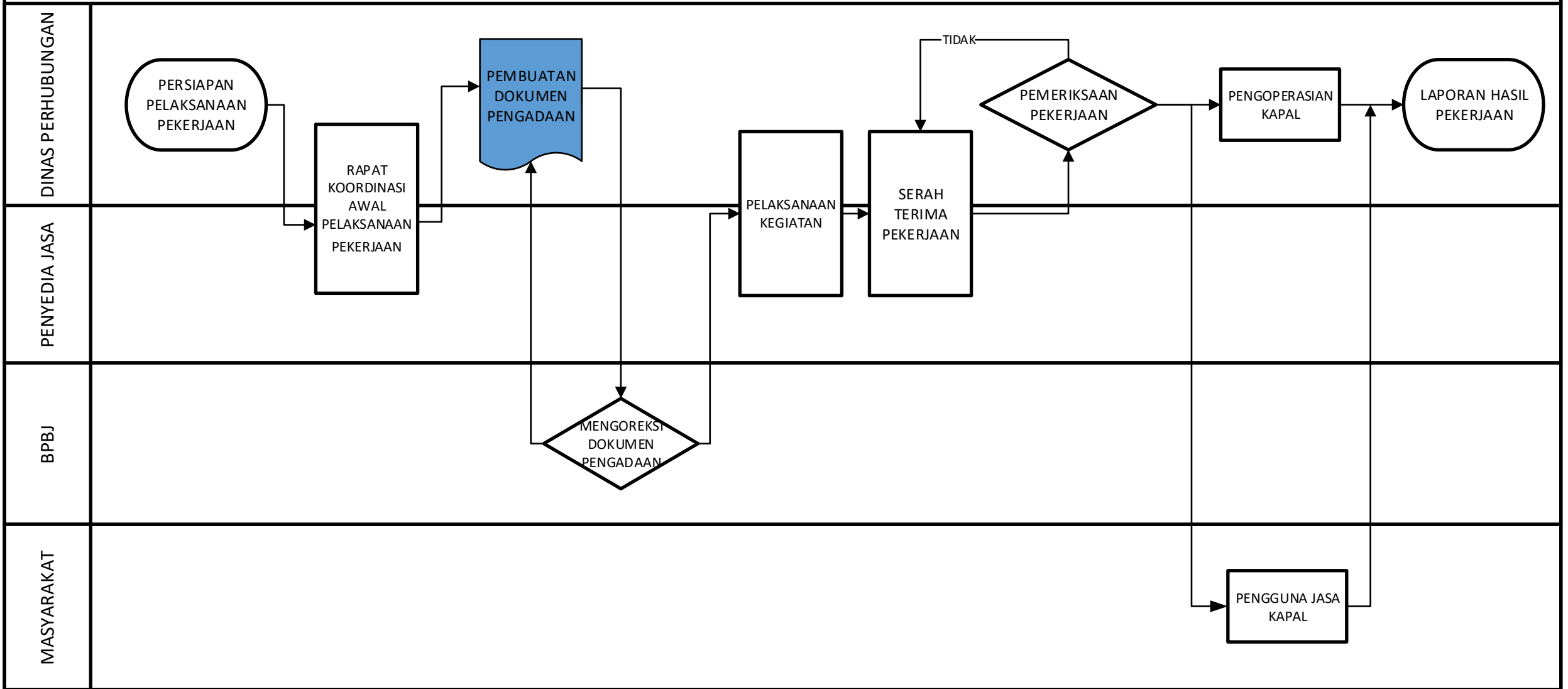
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

BAGIAN HUKUM

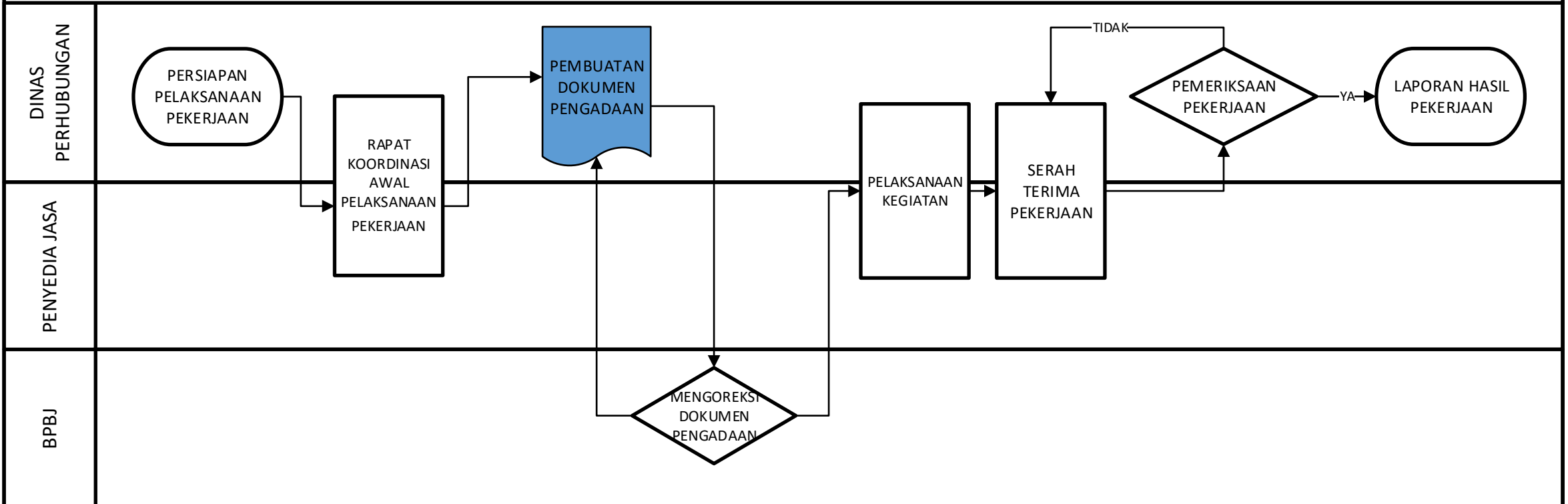
BAGIAN UMUM

PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas